

Judul : Muncul BTS Palsu, penipuan digital semakin canggih
Tanggal : Sabtu, 14 Februari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Muncul BTS Palsu Penipuan Digital Semakin Canggih

WAKIL Ketua Komisi I DPR Anton Sukartono Suratno menyuarakan maraknya praktik menara pemancar sinyal telekomunikasi atau Base Transceiver Station (BTS) palsu untuk penipuan digital. Modus penipuan ini semakin canggih dan merugikan masyarakat luas.

Anton menjelaskan, BTS palsu dilakukan secara mobile dengan memanfaatkan kendaraan yang berkeliling ke berbagai daerah. Pelaku menurunkan frekuensi jaringan dari 4G ke 2G, sehingga korban mudah terhubung ke pesan singkat berisi tautan penipuan. Untuk itu, harus ada tim penegakan hukum yang menindak tegas pelaku itu.

"Tim penindakan memantau aktivitas yang mencurigakan, termasuk BTS palsu, lalu segera menindaklanjutinya. Pelaku penipuan harus dihukum agar ada efek jera," ujar Anton dalam keterangannya, Kamis (12/2/2026).

Bersamaan dengan penegakan hukum, pihaknya juga mendorong penguatan kelembagaan di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), mulai dari aspek peralatan, regulasi, hingga sumber daya manusia. DPR akan menelusuri kesiapan alat, aturan, dan kapasitas SDM yang ada, lalu membahas langkah penguatan jika masih ditemukan kekurangan.

"Insyaallah dari fungsi anggaran kita akan memastikan Komdigi bisa melaksanakan hal tersebut," ujar politikus Partai Demokrat itu.

Selanjutnya, Anton menegaskan, pemberantasan kejahatan digital tidak bisa berjalan sendiri.

Upaya tersebut harus dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai lembaga terkait, termasuk Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta aparat penegak hukum yang berwenang.

"Kami tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan, sehingga sinergi jadi kunci utama. Tujuannya agar negara tetap aman dan ruang digital bisa terjaga bagi masyarakat," katanya.

Senada, anggota Komisi I DPR Nurul Arifin menilai, praktik penipuan digital melalui BTS palsu dilakukan dengan memanfaatkan celah pada spektrum frekuensi. Bahkan, modus itu seringkali dijalankan oleh jaringan terorganisasi, termasuk yang melibatkan warga negara asing.

"Banyak yang dilakukan WNA. Penegak hukum pernah menangkap dua orang non-WNI, namun jaringan mereka terputus dengan aktor di atasnya," ungkapinya.

Berbagai modus tersebut menunjukkan bahwa kejahatan digital kini berkembang semakin profesional, terorganisir, dan memanfaatkan teknologi tingkat tinggi. Karena itu, negara dituntut merespons dengan kemampuan yang tidak kalah canggih demi melindungi masyarakat dari ancaman penipuan siber.

Dia juga mengingatkan pentingnya penguatan perangkat dan peralatan pendukung untuk mengimbangi kecanggihan para pelaku. Tanpa dukungan teknologi yang memadai, upaya pemberantasan kejahatan digital akan sulit berjalan maksimal. ■ PVB